

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Anwar, Saiful, 2011, *Penegakan Peraturan Tindak Pidana PNS Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Tesis, Program Study Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ali, Acmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Baker, Anton H, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Kanius, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gafftar, Afgan, 1999, *Politik Indonesia Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H. Syafiie, Kencana Inu, 2011, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon M, Philipus, 1994, *Pengaturan Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Press Yogyakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- HR, Ridwan, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum; Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kusdarini, Eny, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Paramita, Jakarta.
- Kaloh, J, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, Dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Meitulu, Nain, 2016, *Daftar Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diterima dari Kejaksaan Negeri Baturaja Tahun 2011 sampai dengan 2015, Bagian Tata Usaha Pengadilan Negeri/TIPIKOR Klas 1 A*, Palembang.

- Mahfud, MD Moh, 1998, *Politik Hukum di Indonesia, Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1990, *Peran Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada, Jakarta.
- Poerwadarmita, W.J.S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sae, Niki: 2004, *Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil*, CV. Eko Jaya, Jakarta.
- Soekamto, Suryono, 2008, *Sistim Pemerintahan Good Governance*, Cetakan Pertama, PT. Raja Wali, Jakarta.
- Soekamto Suryono, 2008, *Sistim Pemerintahan Good Governance*, PT. Raja Wali, Jakarta.
- Soermarjono, S.W. Maria, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Gramedian Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sutrisno, Eko, 2008, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara*, Intimedia, Jakarta.
- Sukarhmad, Winarno, 1998, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Sulistiyani, Teguh Ambar, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Prespektif Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kedua, Penerbit Gaya Media, Jakarta.
- Sungono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisno, Eko, 2014, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara*, Penerbit Intimedia, Bandung.
- Thoha, Mifta, 2005, *Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Tjandra, Raiawan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797.

C. INTERNET:

<http://WWW.Pidsus.PN.PLG.Nomor.31/Pid.Sus/2013/PN.PLG.com.>, diakses Senin tanggal 2 Mei 2016.

Wahyu, <http://WWW.Keluarga dan Sistim Kekerabatan.com.>, diakses Sabtu tanggal 1 Oktober 2016.

Ebta, <http://WWW.Pengertian Kroni.com.>, diakses Minggu tanggal 6 November 2016.

Susi, <http://WWW.elface wordpress.com.>, diakses Selasa tanggal 6 Desember 2016.

Wiki, <http://WWW.Teori Persekongkolan.com.>, diakses Minggu tanggal 6 November 2016.

Wiki, <http://WWW.Keluarga.com.>, diakses Sabtu tanggal 1 Oktober 2016.

Wirzak, <http://WWW.Kendala Pemberantasan Korupsi.com.>, diakses Selasa tanggal 8 November 2016.

Yasri, <http://WWW.Teori Keadilan.com.>, diakses Selasa tanggal 27 September 2016.